

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT, DIKLAT DAN PASCA DIKLAT

**KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
BIRO UMUM SETJEN WANTANNAS**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
9. Perka BKN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.

B. Gambaran Umum

Dewan Ketahanan Nasional RI (Wantannas RI) adalah lembaga negara yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Wantannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional. Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas tersebut, sebagai penjabaran tugas fungsi Biro Umum berdasarkan Persetjen Wantannas Nomor 80 Tahun 2020, Kelompok Kepegawaian dan Hukum melakukan penilaian dan peningkatan kemampuan SDM, pelayanan administrasi kepegawaian dan hukum, pengelolaan tata naskah kepegawaian dan dokumen kepegawaian serta dokumen perundangan, guna pencapaian standar pelayanan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, diselaraskan dengan penetapan kinerja utama sebagai suatu ukuran keberhasilan terlaksananya layanan manajemen SDM yang berkualitas dengan arah persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas, Indeks Profesionalitas ASN, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada sinergisme dan keterpaduan dari semua komponen yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu cara dalam memperoleh aparatur pemerintah yang profesional. Diklat merupakan proses yang terencana dan sistematis juga berdampak jangka panjang dalam membekali kompetensi bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Harapannya, aparatur yang profesional akan mampu berkinerja tinggi sehingga visi lembaga dimana mereka mengabdikan bisa tercapai. Pencapaian visi tentu akan berdampak pula pada efektivitas pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini.

Pendidikan dan latihan merupakan suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang mengutamakan perubahan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan sikap seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Bahwa Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Jenis diklat diantaranya adalah Diklat Prajabatan, Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Sedangkan Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

Diklat bertujuan untuk a) meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; b) menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; c) memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan d) menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Efektivitas Diklat aparatur pemerintah harus diukur agar tujuan pengembangan SDM pemerintah, atau penciptaan aparatur yang profesional bisa diketahui efektivitasnya. Maka dari itu, evaluasi paska diklat merupakan langkah strategis dalam pengembangan program Diklat ataupun pengembangan SDM itu sendiri.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi umpan balik untuk merencanakan kembali penyelenggaraan diklat di masa mendatang dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja alumni peserta diklat.

C. Pendidikan dan Pelatihan

Nama peserta, jenis pelatihan dan penyelenggara diklat, sbb:

1. Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Angkatan V Tahun 2021.

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan pembinaan pemangku Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan hasil dari proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dalam Pelatihan ini yang mengikuti adalah **Tri Hariyadi, S.Sos., M.AP.**, Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana, Biro POK NIP. 197911051999031002.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 1-24 September 2021 di Pusbangkom TSK ASN – Lembaga Administrasi Negara RI, berdasarkan surat Kepala Pusat Bangkom TSK ASN Nomor 4417/D.4.3/PDP.07.1 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis PNBPN yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara).

Hasil kualifikasi dari Pelatihan yang diikuti adalah “Cukup” sesuai Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 00002130/DIKLAT FUNGSIONAL/4012/005/LAN-LAN/2021 tanggal 24 September 2021.

2. Pelatihan Calon Analisis Kebijakan Angkatan XV Tahun 2021.

Pelatihan ini untuk membekali peserta dalam menyusun kebijakan publik yang mampu memberikan rekomendasi

kebijakan publik yang berkualitas bertujuan untuk mempersiapkan, membentuk dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional sekaligus prasyarat pemenuhan kompetensi. Pelatihan ini disampaikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran antara lain meliputi ceramah, diskusi interaktif, pembelajaran, dan pembimbingan. Peserta pelatihan ini diikuti oleh **Enang Suhendar, S.Kom**, Analis Manajemen Perkantoran, Biro POK NIP. 198105262009011002.

Pelatihan Calon Analis Kebijakan Angkatan XV Tahun 2021, dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 s.d. 25 Oktober 2021 di Pusbangkom TSK ASN – Lembaga Administrasi Negara RI, berdasarkan surat Kepala Pusat Bangkom TSK ASN Nomor 4418/D.4.2/PDP.07.1 tanggal 20 September 2021 perihal Pemanggilan Peserta Calon Analis Kebijakan (Blended Learning) Angkatan XV Tahun 2021.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis PNBPN yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara).

Hasil kualifikasi dari Pelatihan yang diikuti adalah “Memuaskan” sesuai Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 00002507/DIKLAT FUNGSIONAL/4012/005/LAN-LAN/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

3. Diklat IT- Pelatihan Mikrotik Router.

Pelatihan Mikrotik Router ini adalah untuk peningkatan pemahaman tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 melalui zoom meeting dengan ID meeting 845 3848 3423 dan passcode 769332, berdasarkan surat Account Executive Nurul Fikri Nomor 104/P/NFCOM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Penawaran Pelatihan Online Paket Network.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 15.300.000,- (10org x Rp.1.530.000,-), dengan peserta

berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal Wantannas Nomor ST-63/SI.03/2021 tanggal 26 Oktober 2021 sbb:

- a. Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si.
- b. Mohammad Agussyah
- c. Dedy Purwadi, A. Md.
- d. Adi Nugroho, S.T.
- e. Andreas Christian Siahaan, S.Kom
- f. Galih Pamungkas Sabriarso, A.Md
- g. Guspahri Aridiansyah Hasibuan, A.Md
- h. Robby Haryadi, A.Md
- i. Yayat Ruhiat, A.Md
- j. Jordan Hendrix Setiawan, A.Md

4. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi.

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi adalah bertanggung jawab atas proses monitoring dan evaluasi proyek atau program akan mendapatkan manfaat dari konsep dan praktik monitoring dan evaluasi terbaru, termasuk pendekatan hasil atau partisipatif. Pelatihan ini membawa hasil pelatihan ke dalam praktik di pekerjaan sesungguhnya dan memahami perbedaan antara data, informasi dan pengetahuan yang merupakan aspek kunci untuk memastikan pengambilan keputusan yang strategis.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 27 September s.d. 1 Oktober 2021 secara daring melalui zoom meeting, berdasarkan surat Wakil Kepala LPEM-FEB UI Bidang Pelatihan Nomor 4090/UN2.F6.D2.LPM/PDP.SDK/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Surat Penerimaan Peserta.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (3 org x Rp.4.500.000,-), dengan peserta berdasarkan Surat Perintah Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal Wantannas Nomor Sprin-322/KH.02.01.05/2021 tanggal 24 September 2021 sbb:

- a. Prasetyo, A.Md.
- b. Genanto Atmadiredja, S.E.
- c. Afifah Fitriani, S.E.

5. Pelatihan dan Sertifikasi PBJ.

Merupakan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional dan beretika. Pelatihan ini juga memberikan pembekalan awal bagi para peserta untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 September 2021 di Hotel Amaris Mangga Besar Jakarta Barat, berdasarkan surat Ketua Umum Pusat Pelatihan dan Konsultasi Nasional Nomor S.014/PPKN/BIMTEKNAS-U.PBJ/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Undangan Bimbingan Teknis Nasional.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (3 org x Rp.5.000.000,-), dengan peserta berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal Wantannas Nomor ST-59/KH.01.03/2021 tanggal 6 September 2021 sbb:

- a. Sutawijaya
- b. Mutia Tri Yuliyati, S.E.
- c. Suntama

6. Diklat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pelatihan untuk Menyamakan pemahaman tentang sistem dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga fungsional (legal drafter) dan non fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 5 Maret 2021 melalui zoom meeting berdasarkan Surat Direktur Jimly School of Law and Government Nomor 0045/JSLG-LDT/SK/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Undangan Pendidikan dan Pelatihan.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 3.060.000,- dengan peserta berdasarkan Surat Perintah Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal Wantannas Nomor Sprin-42/KH.02.01.03/2021 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Amali Fajarina, S.H.

7. Pelatihan Teknik audit Berbantuan Komputer (TABK).

Pelatihan ini untuk memberikan keterampilan dan penguasaan teknis teknologi Sistem Informasi yang bisa diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan tugas pokok pengawasan. Pelatihan ini dirancang untuk membentuk APIP agar mampu menggunakan program komputer sebagai bagian dari proses audit dan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur audit

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d, 19 Februari 2021 melalui zoom meeting, berdasarkan Surat Kepala Pusat Diklat BPKP Nomor S-298/DL/3/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Penetapan Peserta Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer bagi Pegawai di Lingkungan APIP dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 2.680.000,-, dengan peserta berdasarkan Surat Perintah Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal Wantannas Nomor Sprin-32/KH.01.03/2021 tanggal 10 Februari 2021 atas nama Daniel Maruli Tua Manik, S.E.

8. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelatihan untuk memahami cara pengadaan dan peran laku pengadaan, dan memiliki pemahaman yang sesuai dengan regulasi terbaru dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pengadaan Barang/Jasa.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s.d.13 Februari 2021 melalui zoom meeting, berdasarkan surat Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional Nomor SR.002/Bimtek-Pengadaan/LPKN/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Biaya pelatihan sesuai MAK 2876.EAF.002.052.A.521119 adalah sebesar Rp. 2.850.000,- (3 org x Rp. 950.000,-), dengan peserta berdasarkan Surat Perintah Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal Wantannas Nomor Sprin-24/KH.02.01.03/2021 tanggal 1 Februari 2021 sbb:

- a. Suntama
- b. Mutia Tri Yuliyati, S.E.
- c. Wim Ruska, A.Md

D. Paska Diklat

Evaluasi Paska Diklat ini mengukur dan menilai sejauhmana program diklat yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan bermanfaat. Jenis evaluasi berbasis outcome cocok untuk menggali kebermanfaatan diklat terhadap alumni. Aspek yang diukur mencakup aspek 1) hasil kerja, seperti produktivitas, frekuensi, kecepatan, keuntungan, prosentase penyelesaian; 2) kualitas seperti deviasi, kecelakaan, komplain, produk gagal; 3) biaya, seperti biaya operasional, pengeluaran mendadak; dan 4) waktu, seperti efisiensi, lembur, 5) kebiasaan kerja, seperti absensi, kelalaian, tepat waktu; 6) iklim kerja, seperti komitmen, pengunduran diri, kerja sama; 7) keterampilan, seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi; 8) kepuasan, seperti kepuasan kerja, kepuasan pelanggan; dan 9) inisiatif, seperti saran, penetapan tujuan, rencana strategis.

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi ini adalah pendekatan kuantitatif. Instrumen yang dikembangkan untuk mengevaluasi paska diklat berupa kuesioner. Klasifikasi hasil penilaian evaluasi paska diklat didasarkan pada referensi kriteria:

No	Interval	Kategori
1.	81% - 100%	Sangat Memuaskan
2.	61% - 80%	Memuaskan
3.	41% - 60%	Cukup Memuaskan
4.	21% - 40%	Kurang Memuaskan
5.	0% - 20%	Tidak memuaskan

Dalam pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi adalah:

1. Belum terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi, dalam hal ini pelaksanaan Diklat yang merupakan sarana pengembangan kompetensi pegawai belum didukung anggaran.

2. Belum optimalnya perubahan kompetensi dan kinerja peserta diklat setelah mengikuti diklat.
3. Belum berkembangnya budaya sharing dalam organisasi secara terencana sebagai bentuk transfer pengetahuan dan pengalaman dalam konteks meningkatkan kinerja organisasi.

E. Hasil Evaluasi

Secara umum, evaluasi program pendidikan dan latihan di Setjen Wantannas masuk dalam kategori memuaskan. Evaluasi tentang kesempatan menerapkan kompetensi di tempat kerja menunjukkan adanya kesulitan yang dialami oleh peserta diklat setelah memasuki instansi masing-masing. Peserta lebih berfikir pada kemampuan diri sendiri dan pembentukan pribadi karena akan sulit untuk merubah rekan kerja yang telah lebih dulu bekerja. Kesempatan memang diberikan oleh pimpinan, namun tetap saja menemui kesulitan terutama jika harus bekerja dengan rekan kerja yang lain.

Salah satu dampak pada peserta khususnya hasil diklat ditempat kerja adalah pimpinan yang mendukung dan memberikan motivasi pada peserta diklat. Dukungan ini juga didukung oleh teman sejawat di lingkungan kerja bahkan sangat mendukung setiap langkah yang dilakukan. Identifikasi perubahan kompetensi setelah mengikuti diklat adalah evaluasi tentang perubahan kompetensi yang terjadi di tempat kerja menunjukkan bahwa. Perubahan terutama terjadi pada mekanisme kerja, cara kerja, tanggung jawab, serta pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan. Namun demikian ada yang merasa belum berubah secara signifikan, karena perubahan-perubahan tersebut lebih kepada dorongan pribadi atas perbaikan diri dalam bekerja, sehingga mau berubah atau tidak tergantung pribadi yang bersangkutan. Identifikasi perubahan kinerja setelah mengikuti diklat adalah evaluasi mengenai perubahan kinerja di tempat kerja menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasakan adanya perubahan dalam kinerjanya.

F. Analisis Kebutuhan Diklat (Training Need Analysis)

Upaya peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) di Setjen Wantannas adalah melalui pendidikan dan pelatihan, dalam hal ini Pegawai diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan

teknologi yang inovati. Pendidikan dan Pelatihan harus menjadi alat untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dengan sasaran pelatihan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat (*Training Need Analysis/TNA*).

TNA dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan analisa kebutuhan terkait dengan pemenuhan target organisasi, dan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi, kemampuan pegawai, dan pengembangan pegawai.

Metode Pengumpulan Data.

1. Wawancara.

Dalam hal ini, menyampaikan kebutuhan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada pengajuan dan pelaksanaan Diklat tahun sebelumnya sesuai kebutuhan organisasi.

2. Asesmen.

Dalam hal ini dilakukan penilaian kualitas diri individu, baik dari karakter, wawasan, pengetahuan, keterampilan dan potensi pemanfaatan maupun pengembangan di masa depan.

Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (*Training Need Analysis/TNA*)

1. Analisis Organisasi.

Capaian kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui keberhasilan visi-misi Wantannas. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dengan kategori capaian kinerja. Aspek perumusan kajian dapat terpenuhi, namun butuh peningkatan pada peningkatan kualitas kajian dan SDM. Dalam hal ini, analisis kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan strategis, tugas dan fungsi organisasi.

2. Analisis Task.

Dari segi analisis Task, Setjen Wantannas mengalami kendala:

- a. Masih kurangnya kemampuan teknis dalam bidang pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Belum optimalnya peningkatan kemampuan diri, sehingga perlu diberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan.
- c. Belum optimalnya persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti.
- d. Belum optimalnya persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan.
- e. Belum optimalnya kemampuan pegawai dalam menunjang kegiatan organisasi

3. Analisis Person

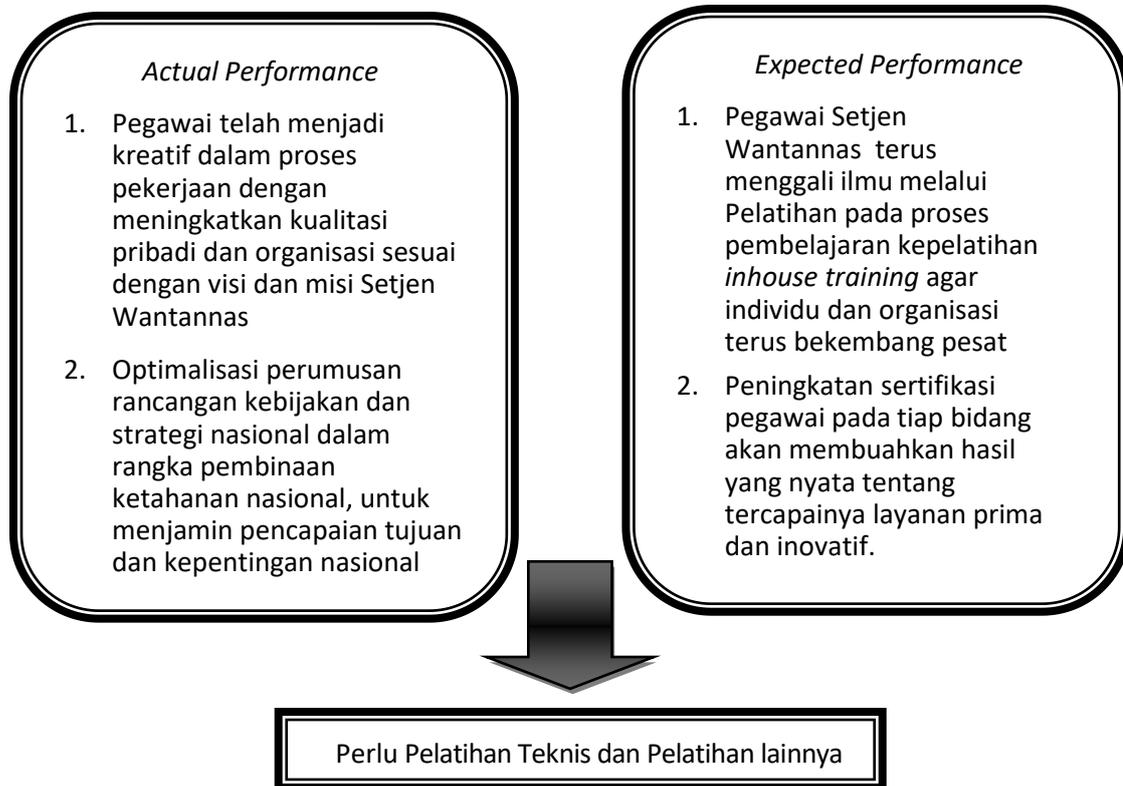
Dari segi person, pegawai Setjen Wantannas telah mampu melakukan SOP dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

Tindaklanjut Analisis Kebutuhan Diklat (*Training Need Analysis/TNA*).

Dari bagan terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara kinerja sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan. Kekurangan masih belum optimalnya kemampuan teknis dalam bidang pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), belum optimalnya peningkatan kemampuan diri, belum optimalnya persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti, belum optimalnya persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan, dan belum optimalnya kemampuan pegawai dalam menunjang kegiatan organisasi Dengan pemenuhan kekurangan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan kualitas rumusan kajian.

Kebutuhan Pelatihan

Sesuai bagan dibawah ini, untuk mencari solusi terhadap kesenjangan yang ada, maka dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu dengan pelatihan-pelatihan teknis dan program inovasi pada setiap kegiatan untuk pencapaian target kinerja.



Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2022

Untuk mencapai target dan sasaran yang diselaraskan dengan penetapan kinerja utama sebagai suatu ukuran keberhasilan terlaksananya layanan manajemen SDM yang berkualitas dengan arah persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas, Indeks Profesionalitas ASN dan Persentase pelaksanaan layanan hukum yang handal dan berkualitas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada sinergisme dan keterpaduan dari semua komponen yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara

instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik. Kebutuhan Diklat tahun 2022 Diklat sesuai analisis adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Membuat Jurnal dan Analysis .
2. Pelatihan Teknis Manajemen ASN.
3. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli.
4. Diklat dan Sertifikasi Auditor Tingkat Ahli Madya.
5. Diklat Bendahara.
6. Uji Kompetensi JFAK.
7. Penyusunan Pengukuran Indeks Profesional Pegawai.
8. Penyusunan Pengukuran Indeks NSPK.
9. Bimtek SKP.
10. Inhouse Training Manajemen Resiko.
11. Dialog Kinerja Penyusunan Matriks Berbagi Peran Hasil.
12. Sosialisasi dan Bimbingan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian.
13. Pelatihan Sisfo.
14. Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
15. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
16. Ujian Dinas Alih Golongan.

BAB III

PENUTUP

Pendidikan dan Pelatihan dipandang penting dan dapat dilanjutkan untuk diselenggarakan dengan memperhatikan sifat aplikatif, berbasis kebutuhan, dan nyata mengenai substansi diklat sehingga diperoleh hasil diklat yang akuntabel dan dapat diaplikasikan. Pengembangan program pelatihan tersebut berorientasi praktik, learning by doing, dan disertai dengan ukuran atau standar keberhasilan yang baku. Untuk peserta Diklat perlu didasarkan pada kebutuhan, tugas dan fungsi, dan komitmen calon peserta diklat serta memperhatikan kondisi dan waktu yang tidak mengganggu aktivitas.

Saran.

1. Perlu dukungan anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan Diklat sebagai sarana pengembangan kompetensi pegawai.
2. Mengoptimalkan kompetensi dan kinerja peserta diklat setelah mengikuti diklat.
3. Melaksanakan kebiasaan budaya sharing transfer pengetahuan dan pengalaman peserta Diklat setelah mengikuti Diklat untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Jakarta, Desember 2021

Koor Pok Kepegawaian dan Hukum,

Imam Supriyadi, S.E.
Pembina / IV.a